



BULETIN

BIOENERGI

Edisi April 2018

www.aprobi.or.id

**UNI EROPA
KALAH TELAK
DARI INDONESIA**

BULETIN BIOENERGI

PenanggungJawab
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia
(APROBI)

Dewan Redaksi
Pengurus APROBI

Alamat Redaksi
Multivision Tower, Lantai 11,
Jl Kuningan Mulia Lot 9B

Buletin ini diterbitkan oleh
Asosiasi Produsen Biofuels
Indonesia (APROBI)



Redaksi menerima kiriman artikel
opini, naskah berita, foto, dan
karikatur. Naskah bisa dikirimkan
melalui pos ke Alamat Redaksi atau
melalui email: office@aprobi.or.id.
Redaksi berhak mengedit dan
mengubah tulisan tanpa mengubah
makna dari tulisan tersebut.

Biofuelpedia

Bioetanol adalah etanol yang berasal dari produksi berbasis nabati seperti gula, pati, dan selulosa. Bioetanol merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Sebagai bahan bakar, bioetanol dapat digunakan langsung atau dicampur dengan bahan bakar lain, terutama gasoline, dan campurannya dikenal sebagai gasohol. Etanol menjadi sumber bahan bakar atau dikenal Fuel Grade Ethanol (FGE) punya tingkat kemurnian 99,5%.
(Berbagai sumber)

TUDUHAN ANTI DUMPING TIDAK TERBUKTI

Pembaca yang terhormat,

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menerbitkan buletin Bioenergi pada bulan keempat pada 2018. Buletin yang mulai dipublikasikan pada pertengahan tahun 2016 ini menginformasikan perkembangan terkini di industri biodiesel dan pada umumnya industri sawit.

Dalam Rubrik Laporan Utama, kami mengulas Kemenangan Indonesia terhadap tuduhan Uni Eropa terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) biodiesel Indonesia tidak terbukti. Ada dua keputusan yang memperkuat posisi Indonesia yaitu Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan sidang Mahkamah Uni Eropa. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan keputusan WTO ini merupakan kemenangan telak untuk Indonesia yang akan membuka lebar akses pasar dan meningkatkan kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia. Produsen biodiesel berharap kemenangan ini akan mendongkrak perdagangan ekspor ke Uni Eropa yang mengalami penurunan semenjak tiga tahun terakhir.

Rubrik Teropong
mengangkat fakta

pembiayaan biodiesel tidak berasal dari duit negara. Semenjak lahirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, pendanaan biodiesel bergantung kepada pungutan CPO dari kegiatan ekspor. Program ini sesuai regulasi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24/2016 mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pembaca, kami harapkan buletin Bioenergi membantu penyebaran informasi positif mengenai peranan biodiesel kepada negara ini., sehingga dukungan masyarakat terhadap industri biodiesel dapat terus meningkat dan memahami pentingnya kehadiran industri bioenergi. Selamat membaca.



PEMERINTAH DIHARAPKAN PERBESAR KONSUMSI BIODIESEL DOMESTIK



JAKARTA, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) MP Tumanggor menjadi pembicara talkshow Economic Challenges bertemakan "Lawan Embargo Sawit", di Stasiun MetroTV, pada 13 Maret 2018. Pasalnya, produk biodiesel Indonesia kesulitan masuk Amerika Serikat dan Uni Eropa akibat kebijakan hambatan perdagangan.

Pembicara lain yang hadir dalam acara ini antara lain Mahendra Siregar (Direktur CPOPC), Dono Boestami (Direktur Utama BPDP-KS), dan Anizar Simanjuntak (Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia).

Dalam sesi tersebut, MP Tumanggor menyebutkan apabila harga sawit turun maka akan ada 20 juta petani

yang terkena imbasnya. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap tegas dalam pelaksanaan mandatori biodiesel.

"Masih terjadi perdebatan antara PSO dan Non PSO. Sebab BPDP menyebutkan konon duitnya cukup untuk memberikan insentif non PSO," ujar Tumanggor.

Solusinya, implementasi mandatori biodiesel 30% atau B-30 dapat dipercepat. "Tidak perlu menunggu tahun 2020 tetapi misalnya dapat dilaksanakan dua atau tiga bulan lagi. Tujuannya harga sawit tidak turun," jelasnya.

Tumanggor mengingatkan turunnya harga sawit akan berdampak kepada petani. Jika pendapatan petani turun maka tidak ada biaya untuk pemupukan dan perawatan tanaman.

Hambatan dagang terjadi di sejumlah negara seperti India dan Eropa yang akan berdampak penurunan ekspor sawit Indonesia. Tumanggor mengharapkan pemerintah lebih tegas supaya memperbesar konsumsi sawit di dalam negeri melalui penggunaan biodiesel.

Untuk pasar alternatif biodiesel, dikatakan MP Tumanggor, bahwa Tiongkok tertarik memanfaatkan biodiesel Indonesia. Adapun potensi ekspor biodiesel ke China mencapai 9 juta kiloliter (KL). "Jadi, sudah ada penajakan dari Tiongkok, tinggal cari modelnya. Bisa sampai potensi ekspor 9 juta ton," kata Tumanggor.

Menurutnya, pemakaian biodiesel di Tiongkok akan membantu pengurangan emisi. Namun, rencana ini masih terus dibicarakan kedua negara baik Indonesia dan Tiongkok. (*)

PROGRAM MANDATORI BIODIESEL HEMAT DEvisa RP 14,83 TRILIUN

JAKARTA, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) menyebutkan program pemberian insentif biodiesel dapat menghemat devisa negara sebesar Rp14,83 triliun per tahun. Devisa negara yang dihemat berasal dari berkurangnya impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mencapai 3 juta kiloliter (KL).

Direktur Utama BPDP KS Dono Boestami menuturkan, "Penghematan dana dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan."

Selain dari penghematan devisa, kata Dono, insentif biodiesel pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp21 triliun pada 2015-2017 untuk implementasi kebijakan mandatori biodiesel.

"Insentif biodiesel sumber dananya bukan dari APBN sehingga negara tidak mengeluarkan uang untuk insentif. Dana yang digunakan dipungut dari perusahaan yang melakukan ekspor komoditas kelapa sawit," tambahnya.

Selain penghematan, skema insentif juga terbukti mengurangi CO2 dan menjadi bagian dari komitmen COP 21 Paris untuk memenuhi target nasional pengurangan emisi sebesar 29% (unconditional) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada 2030. "Tanpa penerapan kebijakan biodiesel Indonesia sulit memenuhi komitmen tersebut," kata Dono.

Saat ini, kata dia, ada 19 produsen biodiesel yang menerima insentif. Besarnya insentif yang diberikan tergantung jumlah biodiesel yang disalurkan.

(Sumber: www.wartaekonomi.co.id)



UNI EROPA **KALAH TELAK** DARI INDONESIA

Tuduhan Uni Eropa terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) biodiesel Indonesia tidak terbukti. Keputusan ini diperkuat dalam Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan sidang Mahkamah Uni Eropa.

Awal 2018, pemerintah Indonesia dan produsen biodiesel mendapatkan kado manis dengan memenangkan gugatan terkait tuduhan BMAD biodiesel oleh Uni



“Keputusan WTO ini merupakan kemenangan telak untuk Indonesia yang akan membuka lebar akses pasar dan meningkatkan kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia. Setelah beberapa tahun terakhir ekspor merosot akibat pengenaan BMAD.”

Enggartiaso Lukita // Menteri Perdagangan

Eropa. Indonesia memperoleh kemenangan dalam hasil panel *Dispute Settlement Body (DSB)* WTO pada 25 Januari 2018.

Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita menegaskan, “Keputusan WTO ini merupakan kemenangan telak untuk Indonesia yang akan membuka lebar akses pasar dan meningkatkan kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia. Setelah beberapa tahun terakhir ekspor merosot akibat pengenaan BMAD.”

Untuk menyelesaikan sengketa BMAD biodiesel, Indonesia telah menempuh jalur hukum melalui pengadilan di Uni Eropa dan

penyelesaian sengketa di DSB WTO. Ada tujuh gugatan utama Indonesia kepada Uni Eropa. Langkah lainnya yaitu pembelaan Indonesia juga disampaikan dalam sidang *First Substantive Meeting (FSM)* pada Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang *Second Substantive Meeting* empat bulan setelahnya.

Sidang panel DSB WTO melibatkan negara lain (*third parties*) untuk melihat persoalan ini antara lain Amerika Serikat, Jepang, Turki, Singapura, India, China, Kanada, Argentina, Australia, Norwegia, Russia, Brasil, dan Ukraina. Indonesia telah mengajukan proses konsultasi persoalan BMAD biodiesel semenjak 10 Juni 2014.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menjelaskan bahwa putusan DSB WTO ini dapat menjadi acuan bagi semua otoritas penyelidikan anti dumping agar konsisten dengan peraturan WTO, terutama selama proses investigasi. Kasus ini, lanjutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak gampang menuduh Indonesia sebagai pelaku praktik dumping. “Komitmen kami dalam mengamankan pasar ekspor adalah

mengawal ekspor Indonesia agar kembali dapat bersaing di pasar negara tujuan ekspor, seperti Uni Eropa,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati menjelaskan, sebagai konsekuensi kemenangan Indonesia dalam sengketa biodiesel dengan UE tersebut, maka putusan Panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO harus diimplementasikan sejalan dengan ketentuan WTO. “UE diwajibkan melakukan penyesuaian BMAD yang telah dikenakan sebelumnya agar sejalan dengan peraturan Perjanjian Anti Dumping WTO,” jelasnya.

Berdasarkan hasil panel DSB WTO telah melihat bahwa Uni Eropa tidak konsisten dengan peraturan perjanjian Anti Dumping WTO selama proses penyelidikan dumping hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia.

Ternyata, ada enam ketentuan perjanjian Anti Dumping WTO yang dilanggar Uni Eropa dalam sengketa Indonesia mengenai pengenaan BMAD biodiesel.

Pertama, Uni Eropa tidak menggunakan data yang disampaikan eksportir Indonesia dalam menghitung biaya

produksi. Kedua, Uni Eropa tidak menggunakan data biaya-biaya yang terjadi di Indonesia pada penentuan nilai normal sebagai dasar penghitungan margin dumping. Ketiga, Uni Eropa menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel di Indonesia.

Keempat, metode penentuan harga ekspor untuk salah satu eksportir Indonesia tidak sejalan dengan ketentuannya. Kelima, Uni Eropa menerapkan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping. Terakhir, Uni Eropa tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel asal Indonesia mempunyai efek merugikan terhadap harga biodiesel yang dijual oleh industri domestiknya.

Menang di Mahkamah Uni Eropa

Pemerintah dan pelaku usaha industri biodiesel Indonesia berhasil memenangkan gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa (UE) dalam kasus pengenaan bea masuk antidumping (BMAD). Dengan demikian, UE mencabut pengenaan BMAD sebesar 8,8-23,3% impor produk biodiesel dari Indonesia. Kebijakan ini berlaku mulai 16 Maret 2018.

"Gugatan banding Pemerintah Indonesia dan sejumlah perusahaan terhadap pengenaan BMAD atas produk biodiesel telah dikabulkan Mahkamah UE. Dengan demikian, para pelaku usaha bisa kembali mengekspor biodiesel tanpa ada tambahan BMAD. Adapun untuk produsen yang tidak mengajukan gugatan ke pengadilan lokal di UE, harus menunggu implementasi hasil keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body /DSB) WTO," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan dalam keterangan resminya, Rabu (21/3).

Oke menyebutkan, ini

merupakan kemenangan ganda Indonesia atas UE, setelah sebelumnya pemerintah berhasil memenangkan sengketa di DSB WTO. Hasil putusan Mahkamah UE dan putusan DSB WTO memberikan sinyal positif bagi negara-negara mitra dagang Indonesia terhadap perdagangan yang adil (fair trade) sektor sawit.

"Dengan adanya kemenangan ini, diharapkan negara-negara mitra dapat menangkap sinyal positif untuk melebarkan akses pasarnya bagi biodiesel Indonesia. Sektor kelapa sawit Indonesia tidak mengandung subsidi dan juga tidak dijual dengan harga dumping," ujar Oke.

Dengan kemenangan tersebut, kata Oke, ekspor biodiesel Indonesia ke UE juga diharapkandapat segera kembali berjalan lancar. "Kemenangan ini tentunya menjadi bekal kuat untuk menghadapi tuduhan yang sama dari negara lain dan mempunyai nilai tersendiri bagi peningkatan ekspor biodiesel maupun produk turunan sawit lainnya. Kemenangan ganda ini juga memberikan peluang yang besar bagi ekspor biodiesel Indonesia untuk kembali bersaing di pasar UE," imbuh Oke.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor biodiesel Indonesia ke UE sempat mencapai US\$ 1.4 miliar pada 2011, sebelum dikenakan BMAD pada tahun 2013. Selama 2013-2016, ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa turun 42,84%, atau dari US\$ 649 juta di tahun 2013 menjadi US\$ 150 juta di tahun 2016. Nilai ekspor biodiesel Indonesia ke UE paling rendah terjadi pada tahun 2015 sebesar US\$ 68 juta.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah menginformasikan bahwa tren pertumbuhan ekspor

biodiesel Indonesia ke UE pada periode sejak pengenaan BMAD sampai dengan dikeluarkannya putusan akhir DSB WTO (2013-2016) diestimasi sebesar 7%. Jika peningkatan tersebut dapat dipertahankan dalam dua tahun ke depan, nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$ 386 juta dan pada tahun 2022 bisa menyentuh US\$ 1,7 miliar.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menegaskan, pemerintah akan terus mengawal hasil keputusan Pengadilan UE tersebut "Pemerintah akan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak produsen/eksportir untuk memastikan bahwa UE segera melaksanakan hasil keputusan pengadilan dan akses pasar benar-benar terbuka," tandasnya.

Sejak 19 November 2013, UE mengenakan BMAD terhadap produk biodiesel Indonesia dengan margin dumping sebesar 8,8%-23,3%. Indonesia kemudian mengambil langkah dengan mengajukan keberatan terhadap pengenaan BMAD tersebut ke Pengadilan Umum Tingkat I UE, serta ke DSB WTO.

Pengajuan gugatan di Pengadilan Umum Tingkat I UE dimulai sejak 19 Februari 2014. Hasilnya, Pengadilan Umum Tingkat I UE menolak penerapan BMAD oleh UE pada 15 September 2016. Dari hasil tersebut UE mengajukan gugatan banding ke Mahkamah UE pada 24 November 2016. Hakim Mahkamah UE kemudian menguatkan putusan Hakim Pengadilan Umum Tingkat I UE untuk menolak penerapan BMAD tersebut. (*)



Resolusi Parlemen Uni Eropa yang menghapuskan penggunaan biodiesel berbasis sawit pada 2021, menjadi batu sandungan kegiatan ekspor Indonesia.

PRODUK BIODIESEL INDONESIA DALAM TEKANAN UNI EROPA

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai kampanye negatif minyak kelapa sawit hingga penolakan masuknya produk tersebut ke Eropa akan mempersulit ekspor ke benua biru itu. Sebelumnya, Parlemen Eropa akan menghapus penggunaan biodiesel dari minyak nabati pada 2030 dan dari minyak kelapa sawit, termasuk dari Indonesia, pada 2021.

Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, pelaku usaha baru saja menghirup angin segar karena telah memenangkan gugatan setelah dituduh melakukan dumping. "Kalau sampai kena (larangan) nanti pada 2021, kita akan sulit lagi. Tahun lalu kita sudah mulai proses itu, tahun ini kita menang soal dumping, industri sudah siap. Tapi paling kita bisa ekspor 2019-2020, lalu pada 2021 kita setop lagi tidak bisa ekspor ke Eropa," jelasnya dalam jumpa pers pada Februari 2018.

Menurut Paulus, pada 2014, ekspor biodiesel sawit ke Eropa mencapai 1,80 juta kiloliter (kl). Namun ekspor itu terus turun

lantaran tuduhan dumping tersebut "Kita sebenarnya bisa tetap ekspor ke Eropa, tapi pajaknya besar, paling besar mencapai hingga 22%. Kami lalu beralih ke yang lain seperti Amerika Serikat (AS), tapi kena (kampanye) serupa," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Paulus Tjakrawan muncul kekhawatiran akan terjadinya efek domino atas tindakan proteksionis AS dan Uni-Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia. "Sebab langkah ini bisa saja ditiru oleh negara tujuan ekspor biodiesel lainnya," ujar Paulus.

Pasalnya, Uni-Eropa juga melakukan penyelidikan anti-dumping terhadap produk Biodiesel Indonesia dan menerapkan BMAD atas ekspor Biodiesel Indonesia di Eropa. Namun, Indonesia telah memenangkan sengketa di WTO secara telak.

Paulus Tjakrawan mengatakan setelah bebas tuduhan dumping, pengusaha biodiesel nasional kini tengah bersiap melakukan ekspor kembali ke Eropa.

Paulus mengakui akan cukup sulit memulai kembali ekspor setelah sekian tahun berhenti melakukan hal

tersebut. Namun demikian, Aprobi berharap volume-ekspor bisa terus didorong. "Permintaan sudah ada. Perusahaan yang mampu melakukan ekspor sudah mulai. Harapan kita sih bisa menyamai 2014 hingga 1,80 juta kiloliter," tuturnya.

Menurut Paulus, keputusan parlemen Eropa yang meminta penghapusan CPO Indonesia tidak konsisten. Padahal sebelumnya, Eropa hanya meminta sawit Indonesia untuk berkelanjutan (*sustainability*). "Itu artinya mereka tidak konsisten dengan keputusannya sendiri. Mereka juga diskriminasi terhadap produk sawit kita," keluhnya.

Menurut Paulus, kampanye negatif di Uni Eropa telah dimulai semenjak 1970-an sudah melaporkan bahwa minyak sawit tidak sehat. Walaupun demikian, produktivitas sawit lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lain seperti rapeseed, kanola, dan kedelai. Sebab perkebunan sawit membutuhkan lahan yang jauh lebih sedikit dibandingkan komoditas lain. Sementara itu, produksi sawit lebih tinggi hampir 10 kali lipat dari minyak nabati lain. "Misalkan saja, kedelai itu perlu lahan 10 kali lebih luas dari sawit untuk dapatkan produksi yang sama. Kalau begitu, bagaimana bisa dikatakan (minyak nabati lain) lebih ramah lingkungan daripada sawit?" tegas Paulus. (*)

TIDAK ADA DUIT APBN UNTUK PEMBAYARAN BIODIESEL



Industri sawit mampu membiayai program mandatori biodiesel melalui program dana pungutan sawit (CPO Fund). Selama ini, dana pungutan dipakai untuk membayar selisih harga biodiesel dan solar. Tidak ada sepeserpun duit negara untuk subsidi biodiesel pasca penerapan CPO Fund.

Pelaku industri biodiesel merasa gerah pasca keluarnya pemberitaan mengenai suntikan subsidi kepada lima grup perusahaan biodiesel. Beberapa media nasional melansir bahwa total subsidi yang diberikan mencapai Rp 5,7 triliun kepada produsen biodiesel

tersebut. Data pemberian subsidi ini bersumber dari laporan KPK terhadap beberapa perusahaan penerima dana subsidi program biodiesel periode Agustus 2015-April 2016.

"Gara-gara pemberitaan tersebut, dampaknya luar biasa besar. Banyak telepon masuk dari

politisi Senayan yang menanyakan kebenaran informasi tersebut," ujar salah seorang eksekutif perusahaan biodiesel.

Menanggapi isu liar ini, Pengurus Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) berinisiatif mengumpulkan media untuk menjelaskan skema dan penyaluran program biodiesel. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI menegaskan, program biodiesel tidak mengambil dana (subsidi) pemerintah. Program ini peroleh dukungan penuh dari dana pungutan.

Dana pungutan yang dimaksud Paulus Tjakrawan adalah dana pungutan sawit (CPO Fund) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Semenjak lahirnya kebijakan ini, kata Paulus, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi kepada biodiesel. Untuk menaungi program ini, pemerintah membuat aturan teknis mulai dari Peraturan Presiden sampai Peraturan Menteri.

Dana pungutan inilah yang dihimpun dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Paulus mengatakan dirinya merasa heran terhadap pemberitaan subsidi biodiesel di saat Parlemen Uni Eropa sedang mengambil suara untuk Resolusi Sawit Eropa. Apalagi, pemberitaan ini gencar disuarakan media in-

“Program biodiesel tidak mengambil dana (subsidi) pemerintah. Program ini peroleh dukungan penuh dari dana pungutan”

Paulus Tjakrawan // Ketua Harian APROBI

ternasional yang beroperasi di Indonesia. “Ada apa ini, kenapa muncul berita ini ketika produk biodiesel mendapatkan tekanan hebat di Uni Eropa dan Amerika Serikat,” tanya Paulus sebagaimana dilansir dari Majalah SAWIT INDONESIA terbitan 15 Februari 2018.

Sebagai informasi, program pengembangan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel dimulai sejak 2006, dimana pada 2008 menjadi program mandatori di Indonesia. Mulai 2009-2014, program BBN mendapatkan dukungan subsidi dari APBN sejalan dengan dukungan subsidi pemerintah untuk BBM Public Service Obligation (PSO) bagi keperluan domestik.

defisit perdagangan luar negeri tahun 2012 (perdagangan komoditas selain minyak bumi surplus US\$ 4 miliar, perdagangan minyak bumi defisit US\$ 5,6 miliar. Total defisit US\$ 1,6 miliar) , maka penyediaan dana untuk subsidi BBN domestik dihentikan pada 2014. Program mandatori penggunaan BBN terhenti pada 2014.

Sejalan dengan itu harga CPO dunia menurun, yang mengakibatkan penerimaan pemerintah, petani sawit dan perusahaan juga menurun. Seperti diketahui karena pengalaman defisit perdagangan tersebut semua program terutama bantuan pemerintah banyak yang terpotong, termasuk program riset, replanting.

Paulus menyebutkan bahwa program biodiesel mendapatkan

sokongan 100% dari pihak swasta yang mengeksport produk sawit dan turunannya. Pihak swasta mempunyai niat baik untuk menggenjot program mandatori biodiesel yang berhenti pada 2014. Kala itu, program biodiesel berhenti lantaran terjadi defisit perdagangan luar negeri sebagai dampak impor minyak bumi melonjak hingga US\$ 5,6 miliar.

Sedangkan, perdagangan ekspor hanya US\$ 4 miliar sehingga terjadi minus perdagangan sekitar US\$ 1,6 miliar. “Kondisi inilah yang menyebabkan subsidi pemerintah untuk BBN (biodiesel) dari tahun 2014,” jelas Paulus.

Di saat yang sama, kondisi industri sawit mengalami masalah dari aspek harga dan permintaan. Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani anjlok antara Rp 500-Rp 600 per kilogram, karena lesunya permintaan minyak sawit di pasar global.

Paulus menyebutkan atas inisiatif dari perusahaan sawit/pengeksport bersama pemerintah merancang program pengumpulan dana untuk meningkatkan kembali penerimaan pemerintah, petani Sawit dan Swasta, menjalankan kembali program BBN-Biodiesel serta program lain nya seperti replanting, riset, dan promosi. “Dana inilah yang dikelola dan disalurkan BPDP-KS salah satunya untuk pembayaran selisih harga antara harga solar dan harga biodiesel ke perusahaan Biodiesel. Sebab, pemerintah (Pertamina) tidak mau menanggungnya,” jelas.

Tidak relevan

Paulus mengatakan perbandingan antara iuran dari perusahaan pengeksport produk sawit dengan pembayaran atas selisih harga solar dan harga biodiesel ke produsen biodiesel adalah tidak relevan.

“Karena itu tidak tepat. Berusaha memojokkan perusahaan BBN biodiesel Indonesia dan berpotensi menggagalkan program BBN Indonesia,” ujar Paulus.

Sebagai contoh, salah satu perusahaan membayar iuran yang besar karena mengeksport sawit, akan tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki pabrik biodiesel. Maka perusahaan tersebut tidak mendapatkan pembayaran selisih harga dari BPDP Kelapa Sawit.

Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan harus dibedakan antara eksportir merangkap produsen, eksportir, dan produsen. Sebab, eksportir memiliki kewajiban membayarkan iuran ke BPDP Kelapa Sawit lalu pungutan tadi dipakai untuk menanggung selisih antara harga solar dan harga biodiesel ke produsen.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit saat ini cukup memberi dampak dalam perluasan pemanfaatan kelapa sawit dan turunannya. Selain membantu penyerapan program mandatori biodiesel, BPDP Kelapa Sawit memiliki beberapa program lainnya yang sangat membantu industri kelapa sawit Indonesia, baik pada sektor hulu maupun sektor hilir. (*)

MEKANISME PEMBAYARAN BIODIESEL **AKAN DIUBAH**



Skema pembayaran biodiesel akan direvisi supaya tidak lagi dituduh menerima subsidi. Dengan begitu dapat mencegah hambatan tarif di negara tujuan ekspor.

Pemerintah sedang mengkaji pembayaran program biodiesel campuran 20% atau B20. Tujuannya adalah menepis tuduhan praktik dumping bagi produk kelapa sawit Indonesia. Selama ini, pola anggaran yang dikelola BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) Kelapa Sawit menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke perusahaan biodiesel sebagai subsidi.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan pemerintah sedang berkoordinasi dengan Pertamina untuk membahas mekanisme pembayaran biodiesel. "Harapannya, dana tidak alirkan ke pengusaha biodiesel tapi lebih

baik Pertamina membeli harga pasar. Selanjutnya, Pertamina akan dibayar BPPDP dari selisih harganya," ujar Oke Nurwan, dalam rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 20 Maret 2018.

Oke menyebutkan apabila mekanisme tersebut dapat terealisasi maka dibutuhkan payung hukum dalam menjalankan mekanisme tersebut. Selain itu kajian tersebut harus segera direalisasikan karena Amerika Serikat salah mengartikan mekanisme tersebut karena dianggap melakukan dumping. Dia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan negara lain ikut memprotes isu sawit Indonesia yang sedang mendapatkan tekanan dari sektor lingkungan.

Menurut Oke, Pertamina masih

akan mempelajari skema tersebut. Sedangkan BPDP akan melengkapi dengan aturan mekanisme pembayarannya.

"Sebenarnya dari gambaran tadi yang disampaikan tidak ada masalah. Memang mekanisme pembayaran kalau biasanya Pertamina dapat membayar dengan harga khusus yang sudah dikurangi selisih harga lantaran produsen (biodiesel) sudah dibayar BPDP. Tetapi ke depan, selisih akan dibayar BPDP langsung ke Pertamina," ucapnya.

Oke mengatakan AS menerapkan pajak anti dumping untuk produk biodiesel asal Indonesia karena ada tuduhan subsidi. Akibatnya, biodiesel Indonesia dikenai harga yang lebih tinggi karena ada tambahan biaya yang ditanggung. Sementara itu, di dalam negeri akan banjir bahan baku sehingga harganya menjadi lebih murah.

Sejatanya, tuduhan subsidi

“Sebenarnya dari gambaran tadi yang disampaikan tidak ada masalah. Memang mekanisme pembayaran kalau biasanya Pertamina dapat membayar dengan harga khusus yang sudah dikurangi selisih harga lantaran produsen (biodiesel) sudah dibayar BPDP. Tetapi ke depan, selisih akan dibayar BPDP langsung ke Pertamina”

Oke Nurwan // Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan

yang ditujukan pemerintah negara Paman Sam merupakan dana yang dihimpun oleh BDPKS dari pungutan ekspor perusahaan-perusahaan sawit sebagai insentif untuk mendorong produksi biodiesel hasil pencampuran minyak solar dengan minyak sawit 20%, karena Pertamina tidak menanggung selisih biaya produksi biofuel dan harga minyak dunia.

Pembayaran margin ini membuat Indonesia dituduh melakukan subsidi karena pola anggaran yang dikelola BPDP mekanismenya menggunakan APBN. Sehingga ketika APBN mengalir ke produsen biodiesel itu menjadi subsidi.

Padahal, lanjut Oke, kejadian yang sebenarnya adalah pembayaran selisih harga dari BPDP sawit kepada produsen penjualan biodiesel bukan berasal dari APBN, melainkan anggaran BPDP itu berasal dari iuran yang diberikan pengusaha sawit saat melakukan ekspor. Jadi Oke menyebut itu adalah anggaran dari produsen yang akan kembali lagi kepada produsen. Karena dengan harga biodiesel yang murah maka *demand* dari pembelian akan meningkat sehingga harga biodiesel dunia juga akan tetap naik jika permintaan tinggi.

Menurut Oke, itu adalah skema yang selama ini dipakai dan saat di ajukan untuk skema baru, di mana

Pertamina yang akan membayar selisih namun tetap menggunakan anggaran BPDP sawit. Hal ini untuk menghindari tuduhan negatif kepada Indonesia.

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) menegaskan tidak ada subsidi untuk biodiesel, yang ada justru penghematan APBN dan devisa negara. Direktur Utama BPD PKS Dono Boestami saat menjelaskan mengenai penyaluran insentif kepada produsen biodiesel. Menurutnya, negara tidak pernah memberikan subsidi biodiesel, namun yang ada adalah insentif yang berasal dari eksportir komoditas kelapa sawit sendiri.

“Insentif yang diberikan kepada pengusaha biodiesel itu bukan dari negara, melainkan dari dana yang dipungut dari perusahaan eksportir komoditas kelapa sawit,” ujar Dono sebagaimana dilansir dari situs bpd.or.id.

Dono menjelaskan, negara mengenakan pungutan kepada setiap perusahaan yang

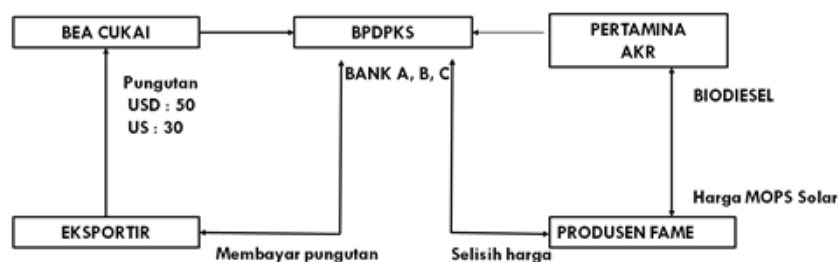
mengekspor komoditas sawit. Dana tersebut kemudian dikelola oleh BDPKS dan digunakan untuk berbagai keperluan di industri sawit nasional, termasuk di antaranya untuk pengembangan biodiesel. Upaya pengembangan biodiesel itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan ketahanan energi nasional untuk menyelamatkan lingkungan dengan mendorong pengembangan energi terbarukan.

Dana dari pungutan itulah yang kemudian diberikan kembali kepada produsen biodiesel sebagai insentif. Tanpa Insentif, penyaluran biodiesel sulit dilakukan oleh perusahaan karena harga indeks pasar biodiesel lebih tinggi dibandingkan harga indeks pasar bahan bakar jenis solar saat ini.

Besarnya insentif yang diberikan tergantung besarnya jumlah biodiesel yang disalurkan. Besarnya jumlah yang disalurkan tergantung dari Kapasitas Produksi dari perusahaan tersebut. Semakin besar kapasitas produksi, semakin besar jumlah biodiesel yang dapat disalurkan.

Saat ini terdapat 19 perusahaan produsen Biodiesel yang menerima Insentif. Semua perusahaan yang memproduksi Biodiesel dan memenuhi syarat kualitas dapat menjadi penyalur Biodiesel. Insentif Biodiesel adalah salah satu wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Sumber dananya bukan dari APBN, sehingga negara tidak mengeluarkan uang untuk insentif ini. (*)

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYALURAN DANA BDPKS





PRODUK BIO ESTER

TINGKATKAN NILAI TAMBAH SAWIT

Kementerian Perindustrian mendukung peningkatan nilai tambah sawit melalui produk hilir salah satunya bio ester.

Industri minyak kelapa sawit (CPO) nasional terus berupaya meningkatkan nilai tambah produknya dengan memperhatikan aspek yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, peran riset dan teknologi menjadi sangat penting dalam pengembangan inovasi produk industri.

"Saat ini, tengah dikembangkan bio ester, produk turunan dari CPO yang memiliki nilai tambah cukup tinggi," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara seperti dilansir dari laman kemenperin.go.id.

Ngakan Timur menjelaskan teknologi pengolahan produk bioester adalah melalui pendekatan baru dalam proses trans-esterifikasi dari minyak nabati khususnya minyak sawit. "Kami yakin produk ini lebih bernilai tambah tinggi, karena nilai tambah produk turunan sawit seperti produk kosmetik dapat mencapai enam kali lipat jika dibandingkan dengan CPO," jelasnya.

Teknologi bio ester dapat dimanfaatkan untuk penggunaan di berbagai produk manufaktur

lainnya, seperti industri farmasi, kosmetik, makanan, pertanian, perikanan, minyak dan gas, pertahanan, produk konsumen rumahan sampai pelumas industri.

Salah satu perusahaan di Indonesia yang telah berhasil menciptakan produk bio ester adalah eBio Advanced Technology (eBio) selaku perusahaan asal Jerman, yang bekerja sama dengan PT Servotech sebagai mitra lokalnya. Berdiri pada 2013, eBio merupakan perusahaan pemegang lisensi untuk teknologi eBio yang ditemukan dan dipatenkan Fraunhofer IVV.

Fraunhofer IVV sebuah lembaga riset rekayasa proses dan kemasan di bawah Fraunhofer-Gesellschaft yang berbasis di Jerman. Fraunhofer-Gesellschaft sendiri adalah organisasi riset terbesar di Eropa yang memiliki 69 lembaga riset di Jerman, dengan dukungan 24 ribu peneliti.

Lebih lanjut, Ngakan memberikan apresiasi kepada eBio atas komitmen untuk melakukan investasi dibidang pengembangan produk yang sarat akan inovasi teknologi. Perusahaan tersebut melalui prosesriset telah berhasil

mengembangkan produk, antara lain bio-degradable berkualitas tinggi serta ramah lingkungan, di tambah dengan harga produk yang sangat kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis di pasar.

"Untuk mengembangkan lebih jauh produk-produk akhir turunan sawit ini, eBio nantinya akan berkolaborasi dengan Balai Besar serta Balai Riset dan Standardisasi di seluruh Indonesia," tuturnya. Balai-balai tersebut merupakan unit pelayanan teknis yang dimiliki oleh Kemenperin, dibawah binaan BPPI.

Apalagi, BPPI sudah memiliki Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru yang fokus terhadap pengembangan produk turunan sawit. "Sinergi antar swasta dengan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat," imbuhnya.

Ngakan Timur berharap produk bio ester ditargetkan bisa mendongkrak nilai ekspor produk turunan CPO. Pada 2017, nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia sebesar 31,05 juta ton atau naik 23 persen dibandingkan tahun 2016 yaitu mencapai 25,11 juta ton. Capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Group Chairman eBio, Toshi Nakajima mengatakan, pihaknya ingin bio ester menjadi produk revolusioner yang dapat menggantikan minyak berbasis mineral dan minyak sintetis. "Kami masih berfokus pada strategi pemasaran untuk mendapatkan kepercayaan dari pelaku industri besar, termasuk instansi litbang serta pemerintah," terangnya.

Dalam memproduksi bio ester, saat ini pabrik eBio masih memiliki satu lini produksi. "Jika sudah full berproduksi, perkiraan produk yang dihasilkan adalah sekitar 15 ton per hari per lini produksi," kata Nakajima. eBio terus menjajaki potensi kerja sama dengan beberapa klien untuk menghasilkan bio ester berkualitas tinggi di Indonesia.

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian

PEMERINTAH BERTEKAD TERUSKAN HILIRISASI INDUSTRI

Pemerintahan Joko Widodo tetap berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia. Langkah konkritnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019.

"Jadi, kita punya arahan jelas ke depan dalam pengembangan industri agar lebih berdaya saing global. Dalam hal ini, pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberi kemudahan bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada akhir Maret 2018.

Kebijakan tersebut menjadi panduan bagi pemerintah untuk pembangunan industri nasional jangka panjang sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Sasaran dari regulasi ini, antara lain adalah fokus pengembangan industri, tahapan capaian pembangunan industri, dan pengembangan sumber daya industri.

Selanjutnya, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan industri prioritas serta industri kecil dan menengah, pengembangan perwilayahan industri, serta fasilitas fiskal dan nonfiskal. "Dalam menyusun regulasi, kami selalu mendengarkan masukan dari para pelaku industri nasional," ungkap Airlangga.

Adapun, beberapa tujuan yang ditetapkan di beleid itu hingga tahun 2019, di

antaranya meningkatkan laju pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,5-6,2 persen. Peran industri manufaktur dalam perekonomian ditargetkan bisa berkontribusi sebesar 18,2-19,4 persen. Selain itu, upaya peningkatan ekspor produk industri dalam negeri.

Melalui Perpres tersebut, pemerintah juga menetapkan sektor-sektor industri yang menjadi andalan masa depan, terdiri dari industri pangan, industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka, industri alat transportasi, industri elektronika dan telematika, serta industri pembangkit energi.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian bertekad menjalankan program hilirisasi industri. "Jadi, jangan sampai kita terus mengekspor sumber daya alam mentah kita tanpa ada pengolahan," ujarnya. Penghiliran yang telah menunjukkan hasil signifikan, meliputi produk berbasis agro dan tambang mineral seperti turunan kelapa sawit, *stainless steel*, hingga produk *smartphone*."

Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan *manufacturing value added* (MVA), Indonesia menempati posisi tertinggi di antara negara-negara di ASEAN. MVA Indonesia mampu mencapai 4,84 persen, sedangkan di ASEAN berkisar 4,5 persen. Di tingkat global, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-9 dunia.

"Dari sektor manufaktur, Indonesia secara persentase untuk kontribusinya terhadap PDB, masuk dalam jajaran lima besar dunia. Mengungguli Jepang, India, dan Amerika Serikat," imbuhnya.

Saat ini, Kemenperin telah menetapkan empat

strategi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi inklusif, yaitu melalui kebijakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri, pembangunan industri ke luar pulau Jawa, peluncuran program *e-smart* IKM, dan penerapan Industry 4.0.

Pengembangan SDM industri bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha saat ini. Upaya tersebut, antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, program *link and match* SMK dan industri, serta program pelatihan industri dengan sistem *3 in 1* (pelatihan, sertifikasi dan penempatan).

Selanjutnya, strategi pembangunan industri ke luar pulau Jawa yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya Indonesia sentris dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Saat ini, sebanyak 10 kawasan industri baru sudah beroperasi, dan ada tiga kawasan industri yang menyusul selesai pembangunannya pada tahun ini, serta ditargetkan lima kawasan industri baru pada 2019.

Mengenai kebijakan *e-smart* IKM, ditujukan untuk peningkatan kesempatan bagi IKM nasional dalam memasarkan produk secara lebih masif melalui *platform digital*. Pada tahun 2017, sebanyak 1730 IKM telah mengikuti *workshop* e-Smart IKM. Tahun 2018 ditargetkan bertambah sebanyak 4000 IKM dan tahun 2019 membidik hingga 5000 IKM. Para peserta *workshop* mendapat pelatihan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas usahanya serta cara berjualan di *marketplace*.

Dalam pengembangan Industry 4.0, Kemenperin telah menyusun *roadmap* yang difokuskan pada lima sektor manufaktur, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia. (*)



APROBI PROMOSIKAN SAWIT INDONESIA DI TAIWAN



Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) mendukung misi dagang pemerintah ke Taiwan. Misi dagang ini berupaya memperkuat ekspor minyak sawit dan kampanye positif.

Kementerian Perdagangan melanjutkan misi dagang ke Taiwan yang dipimpin Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Arlinda dengan memboyong 79 pelaku usaha Indonesia. Misi dagang ini berlangsung pada 22-25 Maret 2018 dalam rangkaian pameran *Indonesian Week 2018*.

Para pelaku usaha yang berpartisipasi berasal dari berbagai sektor yang menjanjikan yaitu

fesyen dan aksesoris, alas kaki, makanan dan minuman, kertas, industri properti, tekstil, kopi, teh, produk kelapa sawit, biodiesel, agen perjalanan, dan pekerja terampil.

Dalam misi dagang ini, Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei menyelenggarakan *Indonesian Week 2018 di Taiwan World Trade Center*, sebuah pusat

perdagangan terbesar di Taiwan.

Arlinda menjelaskan bahwa *Indonesian Week 2018*, terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pameran produk, forum bisnis, *business matching*, forum konsultasi, pentas budaya, kompetisi kuliner, dan kompetisi peragaan busana batik.

"Kegiatan ini bertujuan memberikan berbagai informasi dan memfasilitasi para pelaku usaha dari kedua pihak untuk

bertemu dan mendapatkan mitra bisnis. Kegiatan ini juga merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan perdagangan, kerja sama, dan menciptakan iklim usaha yang saling menguntungkan bagi kedua pihak,” jelas Arlinda.

Pada forum bisnis, para pelaku usaha akan diberikan informasi mengenai hal-hal yang menyangkut kebijakan, peluang bisnis dan investasi, serta peluang kerja sama bagi kedua pihak. “Pada kesempatan ini, Kemendag akan mempromosikan berbagai komoditas ekspor premium, seperti kopi, minyak sawit mentah, serta jasa,” imbuh Arlinda.

Dalam kata sambutannya, Arlinda menyebutkan Indonesia telah menjadi produsen terbesar minyak sawit di dunia. “Jadi silakan belilah kelapa sawit dari Indonesia,” jelasnya.

Komoditas ekspor lain yang berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan devisa adalah minyak kelapa sawit. Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan ekspor senilai USD 20,7 miliar pada tahun 2017 dan pangsa sebesar 47,93% dari total pasar kelapa sawit dunia.

Dalam setahun, nilai impor minyak sawit di Taiwan mencapai USD 176,17 juta dengan pangsa pasar baru 4,66% dari kebutuhan minyak nabati. Sementara itu, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke Taiwan berjumlah US\$ 2,09 juta pada 2017 atau meningkat sebesar 27,39% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 1,64 juta.

Arlinda menggarisbawahi bahwa sektor minyak kelapa sawit memainkan peranan penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, sumber pendapatan



Arlinda menyebutkan Indonesia telah menjadi produsen terbesar minyak sawit di dunia. “Jadi silakan belilah kelapa sawit dari Indonesia,” jelasnya

bagi 5,3 juta lapangan kerja langsung, dan meningkatkan penghidupan 21 juta keluarga petani kecil.

Indonesia berkomitmen memperbaiki cara produksi agar lebih berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam skema Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesia merupakan produsen terbesar Certified Sustainable Palm Oil. “Indonesia siap memenuhi permintaan minyak sawit lestari 100% yang berkualitas tinggi. Saat ini Indonesia memasok 6,58 juta ton atau lebih dari setengah CSPO di pasar global,” tegas Arlinda.

Dalam Forum Bisnis Indonesia-Taiwan, Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) mewakili pemangku kepentingan industri sawit sebagai pembicara.

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI, menyampaikan bahwa keunggulan minyak sawit adalah produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lain. Sebagai perbandingan, minyak soya produktivitasnya 0,5 ton per hektare per tahun. Sedangkan palm oil mencapai 4 ton per hektare per tahun.

“Ini berarti, minyak sawit lebih tinggi produktivitasnya delapan kali daripada minyak kedelai. Itu sebabnya, minyak sawit punya market share tinggi di pasar global,” kata Paulus.

Paulus menjelaskan bahwa market share minyak sawit tahun 1990-an sekitar 17%. Namun sekarang, market share sawit meningkat sampai 33%. Produsen pertama sawit adalah Indonesia. Posisi kedua ditempati Malaysia lalu disusul Thailand, dan Papua Nugini.



Ditambahkan Paulus, kelapa sawit sangatlah cocok tumbuh di Indonesia karena berada di kawasan tropis. Perkebunan kelapa sawit lebih banyak tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Lalu sekarang ini sedang dikembangkan ke wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi dan Papua.

Ajang promosi

Kepala KDEI Robert James Bintaryo berharap, melalui acara ini masyarakat Taiwan dapat mengetahui lebih banyak tentang Indonesia, tertarik untuk mengunjungi Indonesia, dan dapat melakukan bisnis dengan pelaku usaha Indonesia.

Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke-4 dan eksportir kopi terbesar ke-7 di dunia. Di antara kopi berkualitas tinggi dari Indonesia, yang umumnya dikenal di dunia

sebagai “Kopi Premium” adalah kopi Jawa, Mandailing, Gayo, dan Toraja. Ekspor kopi Indonesia ke dunia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 17,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, ekspor kopi Indonesia ke Taiwan pada 2017 sebesar USD 18,49 juta. Potensi ini diyakini dapat terus ditingkatkan.

Sementara pada kegiatan *business matching*, 79 pengusaha Indonesia akan dipertemukan dengan 144 pelaku usaha Taiwan. “Diharapkan para pelaku bisnis dari kedua pihak dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dan berdiskusi lebih detail mengenai produk dan jasa yang diminati,” ujar Arlinda.

Sedangkan di sektor jasa, Pemerintah telah menetapkan beberapa target pasar untuk ekspor pekerja terampil. Taiwan merupakan salah satu negara tujuan untuk

mengirimkan pekerja migran formal/profesional Indonesia.

Di sektor pariwisata, upaya promosi wisata Indonesia di Taiwan dilaksanakan melalui program misi penjualan, partisipasi pada pameran wisata internasional, peran aktif mahasiswa Indonesia melalui berbagai pertunjukan budaya, serta didukung dengan adanya layanan bebas visa ke Indonesia.

Total perdagangan antara Indonesia dengan Taiwan meningkat sebesar 14,21% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Indonesia mengalami surplus terhadap Taiwan di tahun 2017 sebesar US\$960 juta dari total perdagangan US\$ 7,5 miliar. Produk ekspor nonmigas terbesar Indonesia ke Taiwan antara lain batu bara, timah, tripleks, tembaga, karet, produk kertas, serta sotong dan cumi-cumi. (*)